



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Nomor : W3-A8/39.a /PL.01/I/2022

TENTANG

PENETAPAN KONSULTAN JASA POSBAKUM PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu;
- b. bahwa Pengadilan Agama Padang Panjang harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan membentuk pos bantuan hukum;

c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Calon Penyedia Jasa Posbakum Pada Pengadilan Agama Padang Panjang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4282);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5078);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5248);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Penyedia Jasa Posbakum Pada Pengadilan Agama PADANG PANJANG untuk Tahun Anggaran 2022 adalah:

Nama Lembaga : LKKBH IAIN Bukittinggi

Penanggung Jawab : Dr. Nofiardi, M.Ag

Alamat : Kampus IAIN Bukittinggi, Jorong Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

NPWP : 96.527.231.3.202.000

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Padang Panjang adalah pelayanan yang meliputi:

- a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum;
- d. bantuan pendampingan advokat di persidangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 04 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang,



Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

NIP. 19810510 200604 2 004